

**PERAN ASEAN MARITIME FORUM (AMF)
DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM
(STUDI KASUS PEROMPAKAN DI PERAIRAN SELAT MALAKA)**

Oleh: Trialen Lumban Gaol
Email: tralenmarboenlg@gmail.com
Pembimbing: Faisyal Rani, S.IP, MA

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya jl. H.R. Soebrantas KM. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 288293-
Telp/Fak. 0761-63277

Abstract

This Research is an ASEAN regional security study provides an analysis of the role of the ASEAN Maritime Forum (AMF) in maintaining maritime security is focused on cases of piracy in the Malacca Strait. Piracy is known as a violent act committed with the goal of having valuables of other people who do freelance sea or International Bodies and nationally. Where cases of piracy in the region of Southeast Asia, especially the Malacca Strait has increased from year to year, so piracy becomes an offense that requires the cooperation of ASEAN countries to eradicate this case.

In this research uses the conceptual basis, with the concept of role (International Organisations) which here is AMF (ASEAN Maritime Forum), which is supervised by the organization of ASEAN as a regional organization that is still in contact area of the Straits. Backed by the International Organization level analysis and Theory of Constructivism, The concept leads to qualitative methods and library research for references.

Some of the roles performed by the AMF is to be a forum for dialogue between ASEAN countries in resolving cases of piracy, increasing Capacity Building, as well as support the Confidence Building Measures (CBM) and Preventive Diplomacy and invite partners and the International Organization for keeping the Strait of Malacca and perform ngs meeting to discuss maritime security of Southeast Asia.

Keywords: Piracy, Malacca Strait, AMF, Role, Security

Pendahuluan

Keamanan di laut merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian negara-negara di dunia. Isu mengenai keamanan di laut ini juga telah menarik perhatian negara-negara di Asia. Hal ini dikarenakan letak geografis dari negara Asia itu sendiri yang diapit oleh 2 samudera. Lebih lanjut khususnya perairan selat malaka dikenal sebagai jalur pelayaran perdagangan yang ramai dilalui oleh kapal-kapal asing yang membawa minyak mentah, gas ataupun barang tambang. Kawasan Asia tenggara lebih dibatasi oleh wilayah perairan dan

batas negaranya pun masih saling tumpang tindih dengan negara lain. Kawasan laut adalah sebagai jalur utama untuk tindak kejahatan paling besar di dunia.¹

Secara geografis, wilayah Asia Tenggara terletak di antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik). Luas wilayah Asia Tenggara mencapai ± 2.256.781 km² atau sekitar 5%

¹ Bambang Cipto, “Hubungan Internasional di Asia Tenggara”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hal 266

dari luas wilayah Benua Asia. Jalur laut Asia Tenggara merupakan jalur laut tersibuk, karena sekitar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) perdagangan dunia dan pengangkutan setengah BBM dunia transit di Selat Malaka yang memainkan peran sangat sentral dalam menghubungkan satu wilayah dengan bagian-bagian dunia lainnya.²

Selat Malaka berada di antara dua daratan besar yaitu Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Saat ini ada tiga negara berdaulat yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Selat Malaka tidak hanya koridor bagi lalu lintas laut dari Timur ke Barat atau Barat ke Timur, tetapi menjadi jalur komunikasi lintas selat dan mengintegrasikan provinsi dan negara pada masing-masing kedua sisi selat. Sehingga perdamaian dan kestabilan di wilayah Selat Malaka merupakan prasyarat bagi perkembangan pasukan energi yang lancar dan perdagangan antarbangsa antara Kesatuan Eropa dan Asia Timur. Sekitar 50.000 buah kapal yang setiap tahun berlayar, mengangkut sepertiga daripada perdagangan dunia melewati Selat Malaka setelah angkutan kargo umum, minyak dan komoditi terpenting di dunia.³

Selat Malaka memiliki peluang baik, tetapi juga menyimpan resiko tinggi bagi perdagangan luar dan antar-bangsa. Pencemaran, perompakan dan konflik antarbangsa mungkin merupakan ancaman utama yang dapat mengganggu perdagangan dunia dan menimbulkan kerugian yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi ekonomi dunia. Kebanyakan serangan ditargetkan pada kapal-kapal besar (kapal-kapal kargo bantuan korban tsunami, tanker pengangkut bahan kimia dan kapal angkutan muatan curah) di sepanjang

² Umaña, Felipe. 2012. "Threat Convergence Transnational Security Threats in the Straits of Malacca". *The Fund for Peace Publication*

³ Solvay Gerke & Han-Dieter Evers. "Selat Malaka: Jalur Sempit Perdagangan Dunia". *Jurnal Akademika Edisi 81(1) Tahun 2011*. hal. 9-10.

pesisir Sumatera dan di Selat Singapura. Yang lainnya mencari korban pada kapal-kapal penangkap ikan sepanjang pesisir Malaysia. Apabila hal ini terjadi akan membawa dampak yang luar biasa buruknya bagi perdagangan dunia.⁴

Semua faktor tersebut menyebabkan kawasan Selat Malaka menjadi sebuah target Pembajakan dan kemungkinan target terorisme, lokasi geografis Selat Malaka menjadikannya rapuh terhadap praktik perompakan. Pembajakan di Selat Malaka menjadi masalah yang meningkat dari 25 serangan pada tahun 1994 hingga mencapai rekor 291 pada tahun 2015. Sebanyak 24 serangan terjadi pada tahun 2006 hingga tahun 2010.⁵ Dengan data-data potensi dan bagaimana Selat Malaka memiliki peranan besar dalam perekonomian, bukan hanya di Asia Tenggara dan Asia secara keseluruhan, jalur Selat Malaka sudah seperti urat nadi perekonomian dunia. Jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat misalnya, dimana sekitar 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia.

11	2006	2007	2008	2009	2010
Selat Malaka	11	7	2	2	2
Indonesia	50	43	28	15	40
Malaysia	10	9	10	16	18
Myanmar			1	1	
Philiphina	6	6	7	1	5
Singapura	5	3	6	9	3
Thailand				2	2
Vietnam	3	4	11	9	12
TOTAL	33	72	65	55	82

⁴ Valencia Mark, Jhonson. 2005. *Piracy in Southeast ASIA "Status Issues and Responses"*. Singapore, ISEAS Library Cataloguing-in-Publication-Data

⁵ ICC IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships – 2016 Annual Report

(http://psm.du.edu/media/documents/industry_initiatives/industry_reports/maritime_imb_annual-report-2011.pdf). Diakses pada tanggal 18 November 2016.

Tabel. 1.1 Jumlah Perompakan di wilayah Asia Tenggara untuk negara-negara ASEAN kurun waktu 2006-2010
Sumber: *ICC IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships – 2016 Annual Report*.

Untuk mengatasi itu Asia Tenggara dengan dibentuknya (AMF) *ASEAN Maritime Forum* diharapkan lebih meningkatkan keseriusan terhadap keamanan maritim dikawasan ASEAN khususnya Selat Malaka dengan kerjasama pertahanan diwilayah laut⁶. Kerjasama kelautan yang dimasukkan dalam visi AMF memberi tanggapan positif bagi anggota ASEAN terutama Negara yang menggunakan jalur laut untuk kelangsungan kerjasama perekonomian khususnya perdagangan internasional, seperti Singapore, Indonesia, Malaysia dan juga negara-negara yang sangat membutuhkan kepentingan Sentralitas yang membutuhkan keamanan di Selat Malaka untuk menghindari serangan pembajak ataupun teroris.

Dalam hal ini semua Negara wajib memberi dukungan untuk menciptakan keamanan dan stabilitas di wilayah regional ASEAN. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap Negara mempunyai kepentingan tersendiri dalam hal-ekonomi, politik dan kepentingan nasional mereka, tetapi untuk menjaga stabilnya kawasan, peningkatan pertahanan wajib dibentuk bersama. karena menyangkut kelancaran masing-masing kepentingan yang hendak dicapai, serta keuntungan (*benefit*) yang didapat. ASEAN harus mengantisipasi kemungkinan bahwa pembajakan bisa menjadi lebih ganas, sarana maritim semakin dimanfaatkan oleh penjahat dan teroris sehingga ancaman terhadap pengiriman meningkat.

⁶ASEAN Maritim Forum, diakses pada tanggal 24 Agustus 2016 dari

<http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2012/Tabloid%20Diplomasi%20JULI%202012.pdf>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif Konstruktivisme yang dapat menganalisis peran ASEAN Maritime Forum dalam Menangani Keamanan Maritim di Kawasan Asia Tenggara khususnya di Selat Malaka. Perspektif ini didukung dengan 4 asumsi utama. Pertama, konstruktivisme menghargai identitas dan kepentingan negara. Kedua, konstruktivisme melihat struktur internasional sebagai struktur sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ideational seperti norma, aturan dan hukum. Ketiga, konstruktivisme memandang dunia sebagai sebuah proyek konstruksi dalam proses menjadi berlawanan dengan yang telah ada. Keempat, kkonstruksi menitikberatkan pemikiran pada isu ontologisme dan epistemologis⁷

Konstruktivisme tidak mengkhususkan agen, aktor dan unit analisis tertentu. Agen yang dimaksud bisa jadi negara, akan tetapi juga aktor non-negara seperti individu, maupun kelompok seperti gerakan sosial, perusahaan multinasional, organisasi regional, kelompok advokasi non-pemerintahan atau kelompok tertentu. Semua agen non-negara tersebut dapat mempengaruhi norma internasional, identitas dan perilaku negara sebagaimana halnya negara dapat mempengaruhi agen non-negara. Aktor atau agen dan struktur dapat saling membentuk satu sama lain dalam proses sosialisasi.

Dalam konteks ini. AMF ialah salah satu agen atau aktor yang mempengaruhi faktor ideational di ASEAN-khususnya dalam menjaga keamanan kawasan maritim. AMF merupakan turunan dari cetak biru APSC (*ASEAN Political Security Community*). Yang menunjukkan bahwa negar-negara di Asia Tenggara telah memiliki norma, aturan, gagasan, kepercayaan dan nilai-nilai bersama yang diinstitusionalisasikan. Mereka telah

⁷ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. 2010. *International Relations Theory*. New York: Pearson, Hlm 277.

memiliki persamaan pemahaman yang dikonstruksikan bahwa pembentukan AMF dapat menjadi solusi dalam fokus kawasan maritim, baik dalam keamanan, konektivitas, dan Keselamatan perairan.

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) yang berdasarkan fakta yang telah terjadi dari berbagai sumber seperti publikasi resmi, buku, jurnal, koran, dll.

Pembahasan

- **Gambaran Umum Asean Maritime Forum (AMF)**

Asean Maritime Forum adalah Forum dialog dari institusi terkait dengan masalah Kelautan/ Maritim. Pembentukan AMF tertuang dalam APSC (*ASEAN Political-Security Comit*) Blueprint (2009-2015) yaitu dalam butir A.2.5 Mempromosikan Kerja Sama Maritim ASEAN yaitu: dengan membentuk *ASEAN Maritime Forum* (AMF); Menerapkan pendekatan komprehensif yang menekankan pada Keselamatan navigasi dan keamanan regional yang menjadi kepentingan bersama bagi komunitas ASEAN; Mengumpulkan isu-isu maritim dan mengidentifikasi kerja sama maritim diantara Negara-negara Anggota ASEAN; Mempromosikan kerja sama dalam SAR maritim melalui kegiatan-kegiatan, meliputi pertukaran informasi, kerja sama teknologi dan pertukaran antar pejabat terkait.

Mengingat AMF merupakan forum dibidang kelautan yang baru dibentuk, maka pembentukan AMF didasarkan atas prinsip-prinsip dimana AMF tidak akan mengalami tumpang tindih dengan mekanisme sektoral yang sudah ada di ASEAN, serta AMF akan membahas isu lintas sektoral terkait maritim dan memberikan rekomendasi kepada sektoral terkait. Selain daripada itu AMF akan mendorong akselerasi perwujudan Komunitas ASEAN melalui 3 pilar yang terkait dengan permasalahan maritim.

Pembentukan AMF dipandang perlu keberadaanya dengan berbagai alasan yaitu dimana Laut dan perairan di Asia Tenggara

serta Laut Cina Selatan memiliki arti penting bagi Perekonomian, Perdagangan, Transportasi, Komunikasi seluruh negara ASEAN dan kekuatan maritim global, serta Kawasan Asia Tenggara menyimpan potensi konflik yang berkaitan dengan masalah maritime dan juga Isu maritim ditangani oleh berbagai ASEAN *sectoral bodies*, sesuai fokus dan kewenangannya sehingga perlu koordinasi dan sinergi yang komprehensif. Maka berdasarkan hal itu tentu akan memberikan keseriusan antar negara untuk lebih peduli terhadap maritim diwilayah Asia Tenggara.

ASEAN Menghormati prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan. Mengakui bahwa komunitas dan organisasi internasional seperti IMO dan negara-negara yang tergabung didalamnya, memiliki peran dalam menangani ancaman dan tantangan maritim. Dalam hal ini ASEAN melakukan pendekatan yang terpadu dan komprehensif mencakup semua tantangan dan ancaman maritim terkait. Memberikan rekomendasi mekanisme kerjasama maritim yang relevan dalam kerangka ASEAN untuk dipertimbangkan oleh masing-masing anggota. AMF akan melakukan konferensi/seminar tentang kelautan terkait dengan isu-isu yang berkembang dan berpotensi mempengaruhi ASEAN.

ASEAN saat ini diarahkan kepada *common platform* dan bukan pada *common position*. Oleh sebab itu, dalam pertemuan tersebut telah disetujui tiga rekomendasi utama yang dipandang penting bagi kepentingan bersama dan yang realistis untuk segera diimplementasikan sebagai kerangka kerja AMF. Ketiga rekomendasi tersebut adalah *Connectivity, Understanding Maritime Security dan Search and Rescue to Assist Persons at Distress at Sea*.

- **Masalah Keamanan Maritim Selat Malaka**

Selat Malaka menjadi rute navigasi Internasional terpanjang yang melalui selat yang menghubungkan Samudra Hindia melalui Laut Andaman di sebelah utara

Laut Cina Selatan dan di sebelah selatan melalui Selat Singapura. Selat Malaka merupakan rute terpendek bagi kapal-kapal, khususnya yang menuju Asia Timur dan Eropa. Dengan keluasan selat rata-rata antara 11 dan 200 mil laut, jalur masuk di selat ini sebenarnya tidak terlalu lebar di beberapa tempat tertentu di selat tersebut. Rute yang dilayari, kedalamannya malahan kurang dari 30 meter. Meskipun Selat Malaka memiliki fitur-fitur navigasi yang tidak bersahabat, selat tersebut tetap merupakan rute yang menarik dan diinginkan oleh kapal-kapal internasional dibandingkan rute-rute alternatif lainnya seperti Selat Sunda dan Selat Lombok-Makasar.

Keamanan dan isu pengelolaan di Selat Malaka adalah sebuah masalah yang amat kompleks karena melibatkan berbagai aspek dan dimensi serta implikasi yang berbeda. Karena itu dibutuhkan respon yang komprehensif. Salah satu kompleksitas dari keamanan maritim adalah persoalan ganda, yaitu *piracy* dan terorisme. Kompleksitas lainnya adalah keamanan lingkungan dan isu-isu sosial ekonomi. Bagaimana membangun sebuah pendekatan dan respon yang seimbang terhadap masalah-masalah selat tanpa menekankan atau mengurangi arti penting dari isu-isu tertentu seperti dampak aksi internasional terhadap kedaulatan negara-negara pantai menambah kompleksitas keamanan maritim di Selat Malaka. Keamanan navigasi juga menjadi salah satu isu sentral keamanan maritim di Selat Malaka, selain isu polusi laut.

- **Perompakan**

Perompakan adalah salah satu bentuk dari kejahatan maritim. Istilah perompakan kapal atau "*piracy*" memiliki pengertian yang beraneka ragam, baik pengertian yang sifatnya akademis atau praktis maupun definisi yang telah menjadi suatu pedoman yuridis dan telah disepakati oleh negara-negara berdaulat di dunia. namun jelas bahwa terdapat perbedaan mendasar antara perompak kapal dengan pencurian di laut, perampokan diatas kapal, kejahatan teroris

melalui kapal atau penyelundupan. Menurut IMO (*International Maritime Organization*) *Piracy* adalah

*“Unlawful acts as defined in article 101 of the 1982 United Nations Conventions on The Law of the Sea.”*⁸

Sedangkan menurut IMB (*International Maritime Bureau*) *Piracy* hendaknya diartikan sebagai:⁹

“Act of boarding any vessel with the intent or capability to use force in the furtherance thereof”.

Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Selat Malaka		2	1	1	5	
Indonesia	30	51	68	72	68	33
Malaysia	14	8	5	15	11	5
Myanmar	1					
Philiphina	2	3	2	5	8	5
Singapura	7	6	5	8	9	1
Thailand				2	1	
Vietnam	6	4	6	2	19	6
Total	60	74	87	105	121	50

Tabel 1.5 Data Perompakan dan usaha penyerangan di Wilayah Asia Tenggara untuk Negara-negara ASEAN kurun waktu 2011-2016.¹⁰

Sumber: ICC IMB *Piracy and Armed Robbery Against Ships – 2016 Annual Report*.

Berdasarkan data diatas, kasus Perompakan kurun waktu 2010 hingga 2016 mengalami dinamika yang cukup pesat, tahun 2015 merupakan kasus paling

⁸ *Defenition of Piracy dari Reports on ACTS of Piracy and Armed Robbery Againts Ships Annual Report 2015*

⁹ *Defenition of Piracy dari ICC-IMB Piracy and Armed Robbery Againts Ships Report- 01 January-30 September 2016.*

¹⁰ *ICC IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships – 2016 Annual Report, diakses dari : (<http://www.hellenicshippingnews.com/wp-content/uploads/2016/02/2015-Annual-IMB-Piracy-Report-ABRIDGED.pdf>)*

banak untuk wilayah Selat Malaka sebanyak 5 kasus, dimana tahun sebelumnya hanya 1 kasus di 2014 dan 2013 serta 2 kasus di 2012, sedangkan untuk negara Indonesia kasus perompakan tetap mengalami peningkatan meskipun tahun 2015 hanya 33 kasus dimana tahun sebelumnya 68 kasus, sedangkan negara-negara ASEAN lainnya mengalami penurunan kasus perompakan dengan total 50 kasus untuk tahun 2016 dikawasan perairan Asia Tenggara, menurun dibanding tahun sebelumnya sebanyak 121 kasus.

- **Peran Asean Maritime Forum (AMF) dalam Memberantas Perompakan di Perairan Selat Malaka**

Peran yang dilakukan oleh AMF dalam menjaga keamanan maritim dikawasan Asia Tenggara dalam kasus Perompakan di Perairan Selat Malaka pada khususnya yaitu sebagai forum yang memfasilitasi dalam memberikan perkembangan terkini dan pencegahan-pencegahan yang tepat dalam menangani perompakan di Selat Malaka, baik dalam bentuk Workshop, Sharing Informasi, maupun rapat koordinasi dalam pertemuan *ASEAN Maritime Forum*. Perlunya berkolaborasi dan berkoordinasi dengan *sectoral bodies* terhadap keamanan maritim yang dapat melahirkan rekomendasi strategis.

Hal ini menjadi bukti keseriusan negara-negara ASEAN dalam forum ASEAN untuk memberantas Perompakan di Perairan Selat Malaka. Forum ini memang bukanlah berperan secara teknis dilapangan atau menghasilkan perjanjian yang dalam forum, namun hasil dari laporan dalam forum dijadikan sebagai bahan kajian untuk melakukan tindakan-tindakan penangkalan maupun mitigasi di lapangan oleh sektoral terkait. AMF juga melakukan perluasan yang disebut *Expanded ASEAN Maritime Forum* (EAMF) yang mengikutsertakan negara-negara dikawasan Asia Timur dan negara-

negara mitra ASEAN dengan tetap menjaga sentralitas ASEAN. Dalam pertemuan EAMF mengikutsertakan organisasi-organisasi Internasional seperti IMO, IMB, dan ILO maupun ReeCCAP untuk berdiskusi bersama mengenai perkembangan kasus keamanan di Perairan Selat Malaka.

Dengan adanya Pembentukan AMF dan EAMF sebagai perluasan dan bagian daripada AMF yang merupakan komitmen politik bersama bagi seluruh negara anggota ASEAN. Maka aspek peran dalam teori organisasi internasional dapat menjelaskan peran AMF dalam keamanan maritim di Asia Tenggara di perairan khususnya masalah Perompakan di Selat Malaka. Adapun peran AMF (*ASEAN maritime forum*) yaitu, sebagai berikut:

- **AMF Sebagai Wadah atau Forum untuk Menggalang Kerjasama**

Di mana AMF adalah wadah yang disediakan dalam *ASEAN Security Community* (ASC) untuk membahas kerjasama maritim, termasuk menyangkut isu keamanan maritim. Serta hadirnya AMF yang merupakan wadah baru tengah berupaya melembagakan pula kerjasama ASEAN lewat sejumlah agenda yang telah disusun. ASEAN Forum Maritim dirancang sebagai forum untuk membahas langkah untuk memberikan respons terhadap ancaman-ancaman keamanan maritim, seperti pembajakan, perampokan bersenjata dan penyeludupan barang / manusia dan lain-lain

Dalam hal ini peran *ASEAN Maritime Forum* (AMF) yang memberikan konsep hubungan kerjasama di wilayah perairan untuk mengurangi dan memberikan solusi terhadap masalah yang tengah dihadapi. Kekuatan maritim yang dimiliki oleh masing-masing negara dituntut untuk melaksanakan tugas keamanan dan keselamatan di laut sampai diluar wilayah yurisdiksi perairan kawasan Asia Tenggara khususnya di perairan Selat Malaka yang mengikat semua negara maritim di Asia Tenggara hendaknya menjadi pegangan utama. Sehingga isu perompakan yang

diangkat dalam AMF diharapkan dapat mempermudah dalam melakukan penangkalan dan mitigasi bencana (Perompakan) yang terjadi di Perairan Selat Malaka.

- **Sebagai Sarana untuk Perundingan dan Menghasilkan Ide-ide Bersama dengan Negara Mitra**

Di mana AMF merupakan forum dialog instansi-instansi yang terkait dengan isu-isu maritime. Adapun pertemuan/forum yang diselenggarakan AMF dalam melakukan konferensi/seminar tentang keamanan kelautan. Dengan diawali diperluas *Expanded ASEAN Maritime Forum* (EAMF) akan meningkatkan kerjasama EAS tidak hanya dalam arti geografis, tetapi juga dalam partisipasi pemangku kepentingan yang relevan, seperti organisasi internasional, lembaga pelatihan maritim, pemilik kapal, para akademisi, dan masyarakat sipil.

Menekankan bahwa penguatan keamanan maritim dan kerjasama melalui Maritime Forum dan perluasan Forum Maritim ASEAN dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pembangunan masyarakat ASEAN dengan mempromosikan ASEAN yang damai, lebih terintegrasi dan sejahtera dalam stabil, beragam dan dinamis Asia Timur. Menekankan pentingnya Phnom Penh Deklarasi ASEAN: Satu Komunitas, Satu Takdir, di mana para pemimpin ASEAN menegaskan kembali komitmen mereka di KTT ASEAN ke-20 di Phnom Penh pada bulan April 2012 untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama maritim ASEAN dan upaya kolaboratif bersama di bidang terkait kelautan.

Menekankan pentingnya kerjasama internasional dan ketertiban di laut di bawah 1982 Konvensi PBB tentang Hukum Laut kerangka (UNCLOS), kebutuhan untuk menciptakan ketertiban maritim tergantung pada karakteristik masing-masing daerah sesuai dengan hukum internasional yang relevan, termasuk UNCLOS, pentingnya mengidentifikasi daerah nyata dari kerjasama tentang isu-isu

maritim antara negara-negara anggota EAS, dan pentingnya sentralitas dan integritas ASEAN dalam menangani isu-isu maritim di kawasan Asia-Pasifik. Dalam forum bertukar pandangan mengenai prospek konektivitas maritim meningkatkan dengan melihat strategi untuk peningkatan kapasitas, termasuk infrastruktur dan peralatan. Ada juga diskusi yang luas pada pelatihan pelaut.

Simpulan

Asia tenggara dipandang sebagai kawasan strategis dimana, Asia tenggara memiliki jalur pelayaran perdagangan internasional seperti Selat Malaka yang memiliki nilai ekonomi lebih. Karena banyaknya lalu lintas pelayaran yang melewati jalur itu, menjadikan jalur ini rawan akan kejahatan, seperti perompakan, penyelundupan senjata, *drugs*, dan *human trafficking*. Isu keamanan maritim di Selat Malaka akan tetap menjadi bagian penting dari kebijakan negara-negara pantai dan negara pengguna Selat Malaka. Keamanan Selat Malaka akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kontribusi aktif negara-negara pantai dan masyarakat internasional memberi efek terhadap keamanan selat itu sendiri.

Selain melakukan penanganan di dalam negeri, upaya-upaya internasional dalam rangka melawan aksi kejahatan di laut juga perlu dikembangkan. Upaya-upaya tersebut dapat dilaksanakan dalam dua perspektif yaitu dalam kerangka hukum/konvensi internasional dan dalam rangka kerjasama internasional. Dalam penanganannya, terutama dalam melawan aksi kejahatan di Selat Malaka, implementasi dari kedua perspektif tersebut memerlukan suatu inisiatif politik dari negara-negara pantai. Inisiatif politik ini sangat diperlukan untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum internasional, baik yang telah ada maupun yang akan dibentuk. Sementara itu, *legal responses* dari semua pihak juga sangat diharapkan untuk mengikat komitmen-komitmen politik dari

negara-negara tersebut pada tahap implementasi. Kerjasama internasional dalam hal ini dapat dilakukan antar negara, badan/organisasi internasional, dan perusahaan privat yang terkait

Deskripsi diatas menjelaskan bahwa penyelesaian isu keamanan di Selat Malaka dapat dicapai dengan memperkuat kerjasama antara negara-negara pantai, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kerangka kerjasama keamanan yang lebih terkoordinasi di Selat pada satu sisi dengan perbaikan dan bantuan penguatan kapasitas (*capacity building*) antara negara pantai (*littoral states*) dengan negara pengguna (*user states*). Dengan adanya AMF (*ASEAN Maritime Forum*) yang bekerjasama dengan negara-negara yang terlingkup dalam kawasan region Asia-Tenggara dengan negara mitra.

Melalui peran AMF dapat mengatasi semua masalah yang berhubungan dengan maritim melalui usaha bersama, semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan bagi terciptanya masyarakat yang makmur dan damai di kawasan Asia Tenggara. Sehingga dapat terjalin pula kerjasama yang saling menguntungkan, termasuk di sektor maritim, yang sangat penting bagi negara-negara anggota ASEAN untuk lebih mempromosikan pembangunan kawasan yang stabil dan dinamis.

Serta peran *ASEAN Maritime Forum* meyakinkan akan memberikan hasil dan pemikiran yang bermanfaat bagi upaya mengatasi berbagai isu terkait wilayah maritim di kawasan Asia Tenggara. Dalam menghadapi hambatan mekanisme *ASEAN Maritime Forum* dimana sampai saat ini AMF hanya menjadi wadah untuk memfasilitasi dialog mengenai isu maritime.

Daftar Pustaka

JURNAL

Almaududy, Ahmad. “*Piracy in Southeast Asia: An Overview of International and*

Regional Efforts”. Cornell International Law Journal Online. Vol. 1
Kartinawati. 2013. “Peran Sentral *Asean Maritime Forum* dalam Perairan Asia Tenggara”. (Samarinda: e-Journal Ilmu Hubungan Internasional. 1 (3): 715-730, Diakses 25 Agustus 2016.
Solvay Gerke & Han-Dieter Evers. “Selat Malaka: Jalur Sempit Perdagangan Dunia”. Jurnal Akademika. Edisi 81(1) Tahun 2011. hal. 9-10

BUKU

Alan, Collins. 2007. “*Security and Southeast Asia: Domestic, Regional, and Global Issues*”, dalam Bambang Cipto, “*Hubungan Internasional di Asia Tenggara*”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hofmeister, Wilhelm. 2014. *Maritime security and piracy : common challenges and responses from Europe and Asia*. National Library Board, Singapore Cataloguing-in-Publication Data
Jackson, Robert & George Sorensen. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. 2010. *International Relations Theory*. New York: Pearson,
Perwita, Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Rosda.
Soeparapto. R 1997. *Hubungan Internasional Sistem, Interaksi Dan Prilaku*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Valencia Mark, Jhonson. 2005. *Piracy in Southeast ASIA “Status Issues and Responses”*. Singapore, ISEAS Library Cataloguing-in-Publication-Data

INTERNET

ASEAN Maritim Forum dalam keamanan Maritim Kawasan Asia Tenggara, diakses pada tanggal 10 November 2016 dari:

https://www.academia.edu/3676604/ASEAN_Maritime_Forum_dalam

Keamanan Maritim di
Kawasan Asia Tenggara

ASEAN *Political-Security Community Blueprint*, terdapat di www.asean.org/archive/5187-18.pdf, diakses pada tanggal 24 Agustus 2016.

Asean security community dan isu keamanan maritim di kawasan” terdapat di www.fkpmaritim.org/?p=924, diakses pada tanggal 24 Agustus 2016.

ASEAN Regional Forum Plan Action Work Plan Maritime Security Diakses 18

November 2016 dari:

<http://aseanregionalforum.asean.org/files/library/Plan%20of%20Action%20and%20Work%20Plans/ARF%20Work%20Plan%20on%20Maritime%20Security%202015-2017.pdf>

Data Perompakan oleh *International Maritime Bureau* (IMB) tahun 2016,

Diakses pada tanggal 18 November 2016 dari:

<http://www.hellenicshippingnews.com/wpcontent/uploads/2016/02/2015-Annual-IMB-Piracy-Report-ABRIDGED.pdf>

Konsep pembentukan ASEAN Maritim Forum yang diakses pada tanggal 18

November 2016

dari: <http://www.tabloiddiplomasiorg/previous-isuue/104-agustus-2010/902-konsep-pembentukan-aseanmaritime-forum.html>.

Pertemuan pertama Forum Maritim ASEAN, yang diakses pada 10 November 2016

dari: <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pertemuan-I-Forum-Maritim-Asean-AMF.aspx>